

Peran Guru PPKn Terhadap Pencegahan Perilaku *Bullying* Melalui Penerapan Nilai Nilai Pancasila (Studi Kasus Kelas X di SMA Negeri 7 Bandung)

Anggi Puspita Dewi¹, Asep Deni Normansyah², Lili Sukarlina³

¹ Universitas Pasundan dan anggipd22@gmail.com

² Universitas Pasundan dan asepdeninormansyah@unpas.ac.id

³ Universitas Pasundan dan lilisukarlina@unpas.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 12 Juli, 2023

Revised: 13 Juli, 2023

Accepted: 15 Juli, 2023

Kata Kunci:

Bullying, Nilai Nilai Pancasila, Peran Guru PPKn.

Keywords:

Bullying, Pancasila Values, The Role of Civic Teacher.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui bagaimana peran guru PPKn dalam pencegahan perilaku *bullying* melalui penerapan nilai Pancasila yang dilakukan di lingkungan Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini dilakukan, karena di latar belakang oleh kekhawatiran peneliti atas maraknya kejadian *bullying* yang masih terjadi di sekolah dan bagaimana nilai Pancasila yang diberikan guru PPKn dapat mengurangi penyimpangan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus dengan pendekatan kualitatif beserta *mix methods*. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan guru PPKn Kelas X SMAN 7 Bandung dan penyebaran angket pada peserta didik. Hasil penelitian ini ialah guru PPKn memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan perilaku *bullying* di sekolah, dimana guru PPKn memiliki peranan khusus dalam penanaman sikap agar peserta didik tidak melakukan pelanggaran hukum baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Adapun peran guru PPKn yang dilakukan antara lain menyisipkan pemahaman mengenai *bullying* dalam pembelajaran yang diberikan pada peserta didik, lalu menerapkan nilai religius, nilai kebersamaan, persatuan dan nilai demokrasi melalui kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan peserta didik setiap harinya. Keberhasilan penerapan nilai Pancasila tentu nya akan berpengaruh pada perilaku *bullying*, dimana perilaku *bullying* akan ter minimalisir, berkurang, dan tidak terjadi lagi. Selain guru PPKn, SMAN 7 Bandung juga mensosialisasikan bahayanya perilaku *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah melalui spanduk dan banner, juga mengajak seluruh warga sekolah untuk melaporkan setiap percobaan maupun tindakan kekerasan yang terjadi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what the role of the civic teachers is in preventing bullying behavior through the application of Pancasila values carried out in senior high school environments. This research was motivated by researchers' concerns over the many incidents of bullying that still occur in schools and how Pancasila values given by civic teachers reduce this deviation. The method used in this research is a case study with a qualitative approach and mixed methods. Data collection through observation, interviews with civic teachers of class 10, and distributing questionnaires to students. The results of this research are civic teachers have a very important role in preventing bullying behavior in schools, civic teacher have a special role in cultivating attitudes so that students do not violate the law both within the school environment and outside the school environment. The role of the civic teacher includes inserting an understanding of bullying in the study given to students and then applying religious values, values of unity and values of democracy through habituation activities that students can do every day. The success of implementing Pancasila values will certainly affect bullying

behavior, where bullying behavior will be minimized, reduced, and will not happen again. Besides civics teachers, SMAN 7 Bandung also socializes the dangers of bullying behavior through banners, also invites all school citizens to report any attempts or acts of violence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Anggi Puspita Dewi
Institution: Universitas Pasundan
Email: anggipd22@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Arti dari pendidikan tidaklah terbatas karena pendidikan memiliki sifat yang kompleks, seperti sarasannya yaitu manusia. Rahman, dkk (2022, hlm.4) mengatakan bahwa pendidikan merupakan pembelajaran yang diperoleh setiap manusia untuk membuat dirinya mengerti, memahami, menjadikannya dewasa dan membuatnya berpikir lebih kritis. Adapun arti pendidikan secara luas yaitu upaya yang dilakukan manusia untuk meningkatkan ketentraman yang berlangsung sepanjang kehidupannya. Dasar pengetahuan yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara ialah pendidikan. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan atau diwajibkan untuk bersekolah selama 12 (dua belas) tahun. Oleh karena itu, pendidikan merupakan landasan yang sangat penting untuk memastikan warga negara mengetahui bagaimana hukum dan ilmu pengetahuan yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman (Sulianti et al., 2020, hlm.54).

Di situasi saat ini, dimana zaman sudah berkembang pesat, karakter peserta didik mengalami penyimpangan. Seperti yang sering didengar akhir-akhir ini penyimpangan yang terjadi ialah perilaku bullying. *Bullying* menurut Olweus (1999) dalam Darmayanti dan Kurniawati (2018, hlm.55) merupakan masalah psikososial dengan menjelek dan menistakan orang lain secara terus menerus yang berdampak buruk bagi perundung dan korban *bullying*, terutama ketika para perundung lebih berkuasa dibandingkan korban.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI mencatat 226 kasus mengenai kekerasan fisik, psikis, termasuk perundangan/*bullying*, hal itu membuktikan jika kasus *bullying* di lingkungan sekolah masih banyak terjadi di Indonesia (Siallagan, 2022, hlm.1). Usia anak di bangku SMA masuk kedalam tahapan usia remaja. Usia 15-18 tahun merupakan usia rata-rata peserta didik SMA di Indonesia (Nurasri, 2018, hlm. 1). Di samping itu, berdasarkan studi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh *Programme for international student assessment* atau PISA, 41% siswa berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundangan (unicef, 2020, hlm.1). Penuturan komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listyarti pun mengatakan kekerasan fisik juga *bullying* 39% terjadi di jenjang SD/MI, 22% terjadi di jenjang SMP, dan 39% terjadi di jenjang SMA/SMK/MA (Fatiara, 2019, hlm.1).

Pendidikan Kewarganegaraan hadir untuk membangun karakter kewarganegaraan agar peserta didik berperilaku baik dan bertanggung jawab. Peran guru PPKn sangat dibutuhkan agar peserta didik memiliki nilai-nilai karakter sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan seperti *bullying*. Di samping mendidik dan mengajar, guru PPKn memiliki tanggung jawab untuk menghentikan perilaku *bullying*.

Ideologi negara Indonesia ialah Pancasila. Dasar negara yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Perilaku *bullying* dan perilaku menyimpang di sekolah dan lainnya dapat berkurang karena adanya Pancasila. Maksudnya pancasila menjadi pedoman hidup, dimana perilaku seseorang dapat diperbaiki karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila (Nurhasanah, 2019, hlm.15).

Bullying dalam lingkungan sekolah sebenarnya kerap terjadi, hanya saja dalam bentuk sederhana tidak mendapatkan perhatian juga tindak lanjut penyelesaian. Bentuk *Bullying* yang kerap terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Atas ialah seperti *name calling* atau pemberian nama panggilan, mengucilkan, memberikan pandangan sinis, juga mendorong dan beberapa tindakan yang mengarah pada *bullying* secara fisik. Sayangnya, remaja yang melakukan *bullying* tidak berpikir lebih jauh mengenai dampak yang didapatkan dari tindakan *bullying* (Heng, 2020, hlm.142).

Tenaga pendidik atau seorang guru memiliki peranan pokok dalam menangani penyelewengan yang terjadi pada peserta didik. Terlebih seorang guru PPKn, yang dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menangani perilaku *bullying* yang terjadi. Berdasarkan paparan diatas, maka saya tertarik untuk meneliti "Peran Guru PPKn terhadap Pencegahan Perilaku *Bullying* Melalui Penerapan Nilai Nilai Pancasila (Studi Kasus Kelas X di SMA Negeri 7 Bandung)".

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif juga *mix method*. Metode studi kasus ialah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun langkah yang perlu ditempuh pada bagian Teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, studi dokumen, penyebaran angket /kuesioner, dan triangulasi. Sumber yang digunakan ialah sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer penelitian ini ialah, Guru PPKn kelas X SMAN 7 Bandung dan Peserta didik kelas X-C. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sampel berjumlah 36 orang peserta didik guna mendapatkan sumber data tambahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 Bandung ini memuat pembahasan seputar data yang didapatkan peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan tentang peran guru PPKn terhadap pencegahan perilaku *bullying* melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen yang digunakan, antara lain observasi, wawancara dan angket/kuesioner.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan saat di lapangan bahwa keberhasilan peran guru PPKn dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah terjadinya

perilaku *bullying*. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi, hasil pengolahan angket/kuesioner dan hasil wawancara.

Dilihat dari hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti di lapangan masih adanya beberapa peserta didik yang saling mengejek, saling menunjuk, dan menjauhi teman lainnya saat berada di dalam kelas, di samping itu juga pada peserta didik kelas X penerimaan diri dalam suatu komunitas masih menjadi hal yang penting bagi beberapa orang. Oleh karena itu untuk meminimalisir hal tersebut peran guru PPKn dalam pemberian arahan pada peserta didik sangat dibutuhkan.

Selain itu, masih terjadinya penyimpangan moral peserta didik yang ditemui seperti mengikuti tawuran antar sekolah dan lebih memilih mengerjakan PR dibanding mengikuti tadarus al-quran bersama dapat ditanggulangi melalui perwujudan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Hal ini dibuktikan pada pernyataan angket no. 29 "Perwujudan nilai Pancasila perlu dilakukan di lingkungan sekolah untuk membangun moral peserta didik" dengan jawaban peserta didik 2,8% memilih tidak setuju (TS), 5,6% memilih kurang setuju (KS), 47,2% memilih setuju (S) dan 44,4% memilih sangat setuju (SS). Hal ini berkaitan dengan pendapat ahli Djamarah (2005, hlm.36-37) yang mengatakan bahwa guru memiliki tugas kemasyarakatan, dimana guru perlu mendidik dan mengajar masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila". Oleh karena itu, penyimpangan moral yang terjadi pada peserta didik dapat ditangani melalui perwujudan nilai Pancasila agar peserta didik menjadi manusia yang bermoral Pancasila. Adapun tabel mengenai pernyataan angket No.29 ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Jawaban Pernyataan 29

Pernyataan	No	Opsi Jawaban	F	%
Perwujudan nilai Pancasila perlu dilakukan di lingkungan sekolah untuk membangun moral peserta didik	I	Sangat Setuju / SS	16	44,4
	II	Setuju / S	17	47,2
	III	Kurang Setuju / KS	2	5,6
	IV	Tidak Setuju / TS	1	2,8
	Jumlah		36	100

Sumber: Data Diolah (2023)

Pada hasil wawancara dengan guru PPKn kelas X SMAN 7 Bandung, informan mengatakan bahwa peran guru PPKn untuk menerapkan nilai Pancasila sebagai bentuk pencegahan perilaku *bullying* di sekolah sangatlah penting, peran guru yang dilakukan salah satunya dengan tidak lelah selalu mengingatkan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya, supaya saat peserta didik sudah menjiwai nilai Pancasila, perilaku *bullying* di lingkungan sekolah tidak akan terjadi lagi.

Adapun rumusan masalah pertama yaitu bagaimana peran guru PPKn dalam pencegahan perilaku *bullying* di sekolah? Pembahasan mengenai rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Dilihat dari hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti di lapangan masih adanya beberapa peserta didik yang saling mengejek, saling menunjuk, dan menjauhi teman lainnya saat berada di dalam kelas, di samping itu juga pada peserta didik kelas X penerimaan diri dalam suatu komunitas masih menjadi hal yang penting bagi beberapa orang. Oleh karena itu untuk meminimalisir hal tersebut peran guru PPKn dalam pemberian arahan pada peserta didik sangat dibutuhkan.

Peran guru PPKn dalam pencegahan perilaku *bullying* di sekolah sangatlah penting dan diperlukan bagi peserta didik. Sesuai dengan hasil yang peneliti dapatkan dari observasi yang dilakukan, guru PPKn menyisipkan pemahaman mengenai *bullying* dalam pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu guru PPKn juga memberikan nasehat dan motivasi terhadap peserta didik agar tidak melakukan pelanggaran hukum baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, karena saat itu terdapat beberapa peserta didik yang diketahui mengikuti suatu komunitas dan tawuran antar sekolah. Disamping itu juga, sebelum pembelajaran dimulai guru membuka obrolan dengan peserta didik guna terjalinnya komunikasi antara guru dengan peserta didik supaya adanya keterbukaan bila terjadi permasalahan di dalam kelas.

Merujuk pada pernyataan angket no 2 dimana “guru perlu memberikan penjelasan mengenai bahaya perilaku *bullying* di sekolah” dengan jawaban peserta didik 2,8% memilih tidak setuju (TS), 0% memilih kurang setuju (KS), 13,9% memilih setuju (S) dan 83,3% memilih sangat setuju (SS). Penjelasan ini sejalan dengan pendapat ahli Dadang Ahmad dalam Winarno (2019, hlm.54-55) yang menyatakan “peran guru PPKn ialah membangun ketakwaan peserta didik, salah satunya dengan cara memberikan teguran dan mencegah peserta didik melakukan pelanggaran tata tertib dan hukum”.

Tabel 2. Hasil Jawaban Pernyataan 2

Pernyataan	No	Opsi Jawaban	F	%
Guru perlu memberikan penjelasan mengenai bahaya perilaku <i>bullying</i> di sekolah	I	Sangat Setuju / SS	30	83,3
	II	Setuju / S	5	13,9
	III	Kurang Setuju / KS	0	0
	IV	Tidak Setuju / TS	1	2,8
	Jumlah		36	100

Sumber: Data Diolah (2023)

Selain hasil data yang didapatkan dari observasi dan pengolahan angket/kuesioner, terdapat juga data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan dua informan yaitu guru PPKn kelas X di SMAN 7 Bandung. Adapun hasil wawancara yang didapatkan ialah guru PPKn memiliki peran yang berbeda dari peran guru mata pelajaran lainnya, dimana guru PPKn mempunyai tugas khusus dalam penanaman nilai sikap agar peserta didik terbentuk menjadi warga negara yang baik. Di samping memberikan penanaman nilai sikap, guru PPKn juga memiliki peranan penting dalam pencegahan perilaku *bullying* seperti memberikan contoh tentang pembiasaan mengenai perilaku yang baik kepada peserta didik. Selain itu, guru PPKn juga berperan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik dengan cara mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, tujuannya agar peserta didik menjwai nilai-nilai Pancasila tersebut, apabila peserta didik sudah menjwai maka perilaku *bullying* akan ter minimalisir.

Berikutnya, rumusan masalah kedua bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh guru PPKn untuk pencegahan perilaku *bullying*? Pembahasan mengenai rumusan masalah kedua dijabarkan sebagai berikut:

Keadaan yang terjadi di lingkungan sekolah yang menggambarkan peserta didik belum menerapkan nilai-nilai Pancasila ialah masih adanya peserta didik yang tidak mengikuti tata tertib di sekolah. Seperti mengerjakan PR saat tadarus al-quran, tidak melakukan sikap sempurna saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, selain itu bila ada guru yang berjalan di depan nya pun masih ada peserta didik yang cuek, tidak tersenyum dan tidak mengucapkan salam saat berpapasan. Saat pembelajaran di kelas pun tidak semua peserta didik menyimak penjelasan guru dengan baik, masih banyak yang memainkan *handphone*, saling mengejek, memojokkan teman, dan juga mengobrol dengan teman sebangkunya.

Merujuk pada pernyataan angket no 30 “semua warga sekolah tanpa terkecuali perlu mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada sebagai perwujudan salah satu penerapan nilai Pancasila” dengan jawaban peserta didik 2,8% memilih tidak setuju (TS), 0% memilih kurang setuju (KS), 36,1% memilih setuju (S), dan 61,1% memilih sangat setuju (SS). Hal ini menunjukkan jika adanya penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi upaya dalam pencegahan perilaku *bullying* dan terjalinnnya kehidupan yang aman dan tertib.

Tabel 3. Hasil Jawaban Pernyataan 30

Pernyataan	No	Opsi Jawaban	F	%
Semua warga sekolah tanpa terkecuali perlu mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada sebagai perwujudan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila	I	Sangat Setuju / SS	22	61,1
	II	Setuju / S	13	36,1
	III	Kurang Setuju / KS	0	0
	IV	Tidak Setuju / TS	1	2,8
		Jumlah	36	100

Sumber: Data Diolah (2023)

Penjelasan diatas sejalan dengan pernyataan yang tertulis dalam (Tim Tunas Karya Guru, n.d. hlm. 9-10) yang menjelaskan ada beberapa perilaku di lingkungan sekolah yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila antara lain ialah berperilaku sopan dan santun pada guru, mematuhi tata tertib sekolah dan menjalin pertemanan.

Selain hasil data yang didapatkan dari observasi dan pengolahan angket/kuesioner, terdapat juga data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan dua informan yaitu guru PPKn kelas X di SMAN 7 Bandung. Adapun hasil wawancara yang didapatkan ialah penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah perlu dilakukan, karena Pancasila sendiri merupakan dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk terwujudnya kehidupan yang damai, aman dan tentram. Apalagi, saat ini fokus pembelajaran bagi kelas X ialah pendidikan Pancasila, sehingga akan sejalan dengan upaya penerapan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan. Adapun upaya penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah dilakukan di lingkungan SMAN 7 Bandung antara lain penanaman nilai religius melalui pembiasaan tadarus al-quran, mengalunkan asmaul husna, dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan untuk merayakan bulan Ramadhan. Selain nilai religius, nilai

nasionalisme juga ikut ditanamkan dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, melaksanakan upacara peringatan hari-hari penting. Di samping itu, dalam pembelajaran di dalam kelas juga guru PPKn menanamkan nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat dengan memberikan ruang diskusi pada peserta didik.

Selanjutnya, rumusan masalah ketiga yaitu Bagaimana upaya pencegahan perilaku *bullying* yang diterapkan di SMA Negeri 7 Bandung? Adapun pembahasan dari rumusan masalah ini dijabarkan sebagai berikut:

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan, upaya pencegahan perilaku *bullying* yang diterapkan di SMA Negeri 7 Bandung ini ialah sekolah berusaha mensosialisasikan bahayanya perilaku *bullying* dan kekerasan melalui beberapa spanduk dan *banner* yang berisi ajakan untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Selain itu mengajak seluruh warga sekolah untuk melaporkan setiap percobaan maupun tindakan kekerasan yang terjadi.

Melihat pernyataan angket no 12 “perlu adanya sosialisasi atau program mengenai *bullying* dan pencegahannya” dengan jawaban peserta didik ialah 2,8% memilih tidak setuju (TS), 0% memilih kurang setuju (KS), 33,3% memilih setuju (S), 63,9% memilih sangat setuju (SS).

Tabel 4. Hasil Jawaban Pernyataan 12

Pernyataan	No	Opsi Jawaban	F	%
Perlu adanya sosialisasi atau program mengenai <i>bullying</i> dan pencegahannya	I	Sangat Setuju / SS	23	63,9
	II	Setuju / S	12	33,3
	III	Kurang Setuju / KS	0	0
	IV	Tidak Setuju / TS	1	2,8
	Jumlah		36	100

Sumber: Data Diolah (2023)

Sejalan dengan pendapat ahli Ariesto (2009) dalam Zakiyah et al (2017, hlm.327-328) yang mengatakan bahwa sekolah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *bullying*, karena jika sekolah mengabaikan permasalahan *bullying* yang terjadi maka akan membuat pelaku *bullying* mendapatkan kekuatan untuk mengintimidasi dan pemberian hukuman yang tidak membangun akan membuat *bullying* berkembang pesat di sekolah. Maka dari itu, sekolah perlu tegas dalam memberantas perilaku *bullying*.

Hasil wawancara yang didapatkan juga menyatakan jika guru PPKn dan guru mata pelajaran lainnya di SMAN 7 Bandung berusaha untuk mensosialisasikan mengenai bahaya dan dampak yang didapatkan bila terjadi *bullying*, juga memberikan nasehat dan teguran bila peserta didik melanggar, selain itu juga menjalin hubungan dengan wali kelas maupun guru BK untuk mengkomunikasikan masalah bila terjadi perilaku *bullying*.

4. KESIMPULAN

Penerapan nilai Pancasila yang dilakukan guru PPKn untuk pencegahan perilaku *bullying* antaranya penerapan nilai religius, nilai kebersamaan, persatuan, dan nilai demokrasi, dimana nilai-

nilai Pancasila ini dikemas kedalam kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan oleh peserta didik setiap harinya. Namun tentu nya upaya penerapan nilai Pancasila yang dilakukan tidak terlepas dari hambatan yang ditemukan yaitu pengaruh teman sebaya, faktor lingkungan dan kesadaran diri peserta didik. Keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik tentu nya akan berpengaruh pada perilaku *bullying*, dimana perilaku *bullying* akan ter minimalisir, berkurang dan tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan karena, perilaku *bullying* bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, K., & Kurniawati, F. (2018). *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya*. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v17i1.13980e>. ISSN 2579-7700
- Djamarah, S. B. (2005). *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. PT Rineka Cipta.
- Fatiara, N. (2019). *KPAI: 153 Kekerasan Anak Terjadi di Sekolah, Pelakunya Mayoritas Guru*. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/kpai-153-kekerasan-anak-terjadi-di-sekolah-pelakunya-mayoritas-guru-1sXmURDSLI>
- Heng, P. H. (2020). *Perilaku Delinkuensi: Pergaulan Anak dan Remaja Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua*. Penerbit ANDI.
- Nurasri, C. D. (2018). *Pengaruh Dukungan Sosial Informasi Terhadap Perencanaan Orientasi Masa Depan Bidang Pendidikan pada Siswa SMAN X. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Nurhasanah. (2019). *Upaya Mengurangi Tindakan Bullying Sesama Siswa dengan Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Belajar Audio Visual Di MTS Ulil Absor Panti Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). *Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan*. 2(1), 1–8.
- Siallagan, A. (2022). *Atasi Perundungan, Psikolog: Sekolah Harus Lakukan Pengawasan dan Evaluasi*. <https://www.kompas.com/edu/read/2022/09/06/105047871/atasi-perundungan-psikolog-sekolah-harus-lakukan-pengawasan-dan-evaluasi?page=all>
- Sulianti, A., Efendi, Y., & Sa'diyah, H. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 54–65. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n1.2020.pp54-65>
- Tim Tunas Karya Guru. (n.d.). *PASTI BISA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Penerbit Duta.
- unicef. (2020). *PERUNDUNGAN DI INDONESIA: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/>
- Winarno. (2019). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, Penilaian*. Bumi Aksara.
- Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). *Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan Bullying*. 4, 324–330.